

REVISI 2022

RENCANA STRATEGIS



2020—2024



KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

JALAN DOKTER SUJONO, JEMPONG BARU, SEKARBELA, KOTA MATARAM



Si
Kika

Kijang Mandalika

CANTIK

Cepat, Akuntabel, Netral,
Transparan, Inovatif, dan Kredibel



ZI-VWBK

Badan Bahasa
Bermartabat
Bermanfaat



**MERDEKA
BELAJAR**

RB
Reformasi Birokrasi
Kantor Bahasa Indonesia



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

**KANTOR BAHASA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram

Telepon (0370) 623544

Laman: kantorbahasantb.kemdikbud.go.id; Pos-el: kantorbahasantb@kemdikbud.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR:1644/I5.18/PR.00.02/2022

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2020—2024**

**KEPALA KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Rencana Strategis Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, perlu menetapkan Rencana Strategis Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020—2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Rencana Strategis Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020—2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005—2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

**KANTOR BAHASA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram
Telepon (0370) 623544

Laman: kantorbahasantb.kemdikbud.go.id; Pos-el: kantorbahasantb@kemdikbud.go.id

4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020—2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020—2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020—2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 555) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020—2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 319);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

**KANTOR BAHASA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram
Telepon (0370) 623544

Laman: kantorbahasantb.kemdikbud.go.id; Pos-el: kantorbahasantb@kemdikbud.go.id

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG RENCANA STRATEGIS KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020—2024.**

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020—2024, yang selanjutnya disebut Renstra Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020—2024, yang merupakan dokumen perencanaan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat ini.

KEDUA : Renstra Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat 2020—2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman bagi Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam penyusunan kegiatan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

KETIGA : Renstra Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat 2020—2024 termuat dalam Rencana Kerja (Renja) Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat yang merupakan dokumen Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk periode 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Renstra Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat 2020—2024 dipergunakan sebagai pedoman bagi Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk penetapan Rencana Kerja Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2020—2024.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

**KANTOR BAHASA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram
Telepon (0370) 623544

Laman: kantorbahasantb.kemdikbud.go.id; Pos-el: kantorbahasantb@kemdikbud.go.id

- KELIMA** : Seluruh Pegawai di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap capaian pelaksanaan Renstra Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat 2020—2024 yang telah dituangkan dalam Renja Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- KEENAM** : Renstra Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat 2020—2024 dapat diubah dan disesuaikan sepanjang:
- terdapat peraturan dan/atau kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang mengamanatkan perubahan Renstra Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; atau
 - adanya perubahan struktur organisasi dan/atau tugas dan fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- KETUJUH** : Keputusan Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 4 Juli 2022

Kepala Kantor Bahasa
Provinsi Nusa Tenggara Barat,



Puji Retno Hardiningtyas, M.Hum.
NIP 198103092006042002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan YME atas rahmat-Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020 – 2024 Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat diselesaikan dengan baik. Renstra ini disusun sebagai panduan implementasi program kebahasaan dan kesastraan yang berdasarkan pada Renstra Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Renstra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dan hasil evaluasi pelaksanaan pada periode sebelumnya. Renstra Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat disusun dengan mempertimbangkan kerangka berpikir pembangunan manusia yang berkarakter sehingga semua program berjalan efektif, efisien, dan akuntabel. Revisi Renstra Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat disusun berdasarkan pada Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi perlu dilakukan sebelum melaksanakan program kinerja dengan prioritas pembangunan nasional, tugas, dan fungsi UPT Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang tertuang pada Renstra tahun 2020 – 2024.

Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam melaksanakan Renstra 2020 – 2024 dengan mendukung tiga program prioritas Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, yaitu (1) penguatan literasi kebahasaan dan kesastraan, (2) perlindungan bahasa dan sastra daerah, dan (3) internasionalisasi bahasa Indonesia. Strategi pelaksanaan kegiatan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dilaksanakan berdasarkan basis Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional (KKLP) sehingga semua program kegiatan dapat terfokus dan terarah dan berdampak luas untuk masyarakat.

Renstra Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 – 2024 ini memuat visi, misi, tujuan, strategis, sasaran strategis, arah kebijakan,

struktur program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Renstra ini digunakan sebagai pedoman dan acuan untuk pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra di Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mencapai pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang menyeluruh. Dengan demikian, program kebahasaan dan kesastraan diharapkan makin bermartabat dan bermanfaat dalam meningkatkan kualitas masyarakat.

Mataram, 3 Juli 2022

Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB,

A circular official stamp in blue ink. The outer ring contains the text "KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI" at the top and "190710N" at the bottom, separated by a star. The inner circle contains the text "KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGARA BARAT". A handwritten signature in blue ink is written over the right side of the stamp.

Dr. Puji Retno Hardiningtyas

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Kondisi Umum.....	5
BAB II TUJUAN DAN SASARAN.....	20
2.1 Visi	20
2.2 Misi	20
2.3 Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan.....	21
2.4 Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran.....	23
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA LEMBAGA	26
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi	26
3.2 Kerangka Regulasi.....	31
3.3 Kerangka Kelembagaan.....	35
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	39
4.1 Target Kinerja.....	39
4.2 Kerangka Pendanaan	43
BAB V PENUTUP	47



Bab I

Pendahuluan

CANTIK
Cepat, Akuntabel, Netral,
Transparan, Inovatif, dan Kredibel



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025. Demikian juga Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan Bahasa berkewajiban menyusun Renstra sebagai dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun). Sistem perencanaan pembangunan nasional merupakan acuan keseluruhan pembangunan bagi seluruh entitas kelembagaan di Indonesia. Sistem tersebut menghasilkan rencana jangka pendek, menengah, dan panjang. Jangka panjang akan ditempuh dalam kurun waktu 20 tahun mulai 2005 – 2024, melalui empat tahapan. Tahap akhir (2020 – 2024) dengan tema penguatan daya saing regional dan internasional, merupakan kelanjutan dari proses sebelumnya. Fokus utama tahap ini terletak pada peningkatan mutu sumber daya manusia (SDM) untuk menciptakan manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing dengan karakteristik, yaitu sehat, cerdas, adaptif, kreatif, inovatif, terampil, dan bermartabat. Renstra ini memuat visi, misi, strategi, program, kegiatan, dan rencana aksi sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu melaksanakan pengkajian dan pemasyarakatan bahasa dan sastra Indonesia di provinsi wilayah kerja, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terdiri atas 10 kabupaten/kota.

Fokus pembangunan dalam bidang kebahasaan dan kesastraan ini mengacu pada Renstra Badan Bahasa Tahun 2020 – 2024. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, terdapat beberapa kebijakan baru yang mendorong Badan

Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melakukan penyelarasan dan penyempurnaan rencana strategis sebagai berikut.

1. Perubahan rencana strategis Kemendikbudristek berdasarkan Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
2. Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) berdasarkan surat edaran bersama Deputy Bidang Pendanaan Pembangunan a.n. Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 dan Direktur Jenderal Anggaran a.n. Menteri Keuangan RI Nomor S-122/MK.2/2020 tentang Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran.
3. Perubahan organisasi dan tata kerja di lingkungan Kemendikbudristek berdasarkan Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
4. Perubahan organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa.

Renstra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa ini disusun sesuai dengan pedoman teknis penyusunan rencana strategis kementerian/lembaga yang diatur dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020 – 2024.

Dalam sepuluh tahun terakhir, setelah diterbitkannya Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa secara konsisten menetapkan rencana strategis (renstra) yang mengacu pada tugas dan fungsi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sebagaimana disebutkan di dalam Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2014 yang diturunkan dari undang-undang tersebut. Secara singkat dapat disebutkan bahwa tugas dan fungsi utama BPP Bahasa adalah mengembangkan, membina, serta melindungi bahasa dan sastra Indonesia; mengoordinasikan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra daerah dengan pemerintah daerah; dan meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Selanjutnya, perincian tugas dan fungsi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang paling mutakhir tercantum dalam Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Penyelenggaraan tugas-tugas pokok tersebut diwujudkan dalam sejumlah program prioritas dan strategis yang diyakini akan menghasilkan kondisi dan peningkatan yang terukur dari keadaan sebelumnya.

Sebagai tolok ukur turunan Renstra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, program Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat diarahkan pada tiga program strategis, yaitu (1) pembangunan budaya literasi, (2) perlindungan bahasa daerah, dan (3) internasionalisasi bahasa Indonesia.

Lima tahun terakhir, misalnya, program prioritas lebih diarahkan untuk peningkatan kompetensi literasi para penutur bahasa Indonesia dan daerah, sejalan dengan penancangan gerakan literasi nasional oleh Pemerintah Pusat.

Peningkatan kompetensi literasi itu di lingkungan BPP Bahasa diterjemahkan menjadi sejumlah program yang bukan hanya berupa penyediaan buku-buku atau bahan-bahan pengayaan literasi untuk persekolahan atau pelatihan para fasilitator gerakan literasi nasional, melainkan juga mencakupi penyediaan buku-buku untuk perpustakaan dan/atau taman-taman bacaan masyarakat yang tersebar di seluruh wilayah

negara Republik Indonesia, khususnya di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal (dikenal dengan wilayah 3T).

Program literasi juga didukung melalui pengayaan kosakata dan istilah bahasa Indonesia untuk dijadikan entri dalam beberapa produk leksikografi, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), glosarium istilah bidang ilmu, tesaurus, ensiklopedia, dan kamus khusus yang juga mencakup kamus bidang ilmu dan kamus istilah budaya. Program pengayaan kosakata dan istilah ini dijadikan sebagai salah satu prioritas dengan tujuan agar bahasa Indonesia memiliki daya ungkap yang lebih baik sebagai bahasa modern. Dengan kekayaan daya ungkap tersebut sebuah bahasa akan menjadi alat ekspresi yang memadai untuk mengungkapkan semua konsep dalam bidang kehidupan manusia sehingga tidak hanya berfungsi sebagai bahasa pergaulan yang digunakan dalam komunikasi sehari-hari, tetapi juga akan digunakan sebagai bahasa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Sampai akhir 2021, KBBI telah memuat tidak kurang dari 115.000 entri yang berpotensi dijadikan dasar pengembangan keterampilan berbahasa bagi para penutur bahasa Indonesia. Jika dibandingkan dengan bahasa-bahasa modern yang lain, misalnya bahasa Inggris, jumlah entri tersebut memang belum benar-benar mencukupi bagi bahasa Indonesia untuk tampil menjadi bahasa dunia. Oleh karena itu, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa terus bekerja untuk menambah jumlah lema di dalam KBBI ini. KBBI juga terbit di dalam bentuk luring (*offline*) dan daring (*online*) yang setiap bulan April dan Oktober dimutakhirkan untuk memenuhi kepuasan pengguna kamus.

Pelindungan bahasa dan sastra daerah menjadi program prioritas dalam beberapa tahun terakhir ini. Pertimbangannya adalah Indonesia memiliki begitu banyak bahasa dan sastra daerah, tetapi kondisinya banyak yang terancam punah. Kepunahan sejumlah bahasa dan sastra daerah cenderung disebabkan oleh semakin menurunnya jumlah penutur bahasa-bahasa dan sastra daerah tersebut, sementara penutur muda tidak banyak bertambah. Migrasi ke luar daerah, globalisasi, bencana alam, dan pengaruh bahasa-

bahasa luar menjadi faktor-faktor utama penyebab kepunahan bahasa dan sastra daerah tersebut, selain faktor lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu sikap bahasa. Sikap bahasa penutur bahasa daerah yang cenderung mulai mengalihkan tuturannya ke dalam bahasa yang dianggap lebih berprestise dan mulai terhentinya transmisi bahasa daerah ke generasi di bawahnya menjadi salah satu penyebab terancamnya suatu bahasa.

Sesuai dengan amanat UU No. 24 Tahun 2009 sebagaimana telah disebutkan di atas, BPP Bahasa juga terus memprioritaskan program penginternasionalan bahasa Indonesia. Kerja sama BPP Bahasa dengan lembaga-lembaga negara di dalam dan luar negeri dalam penyelenggaraan pengajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing (BIPA) telah berkembang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir ini. Tidak kurang dari tiga puluh negara dengan dua ratus institusi di dalamnya telah aktif menjadi bagian dari

penyelenggaraan program BIPA ini. Catatan terakhir sampai pertengahan tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah pemelajar BIPA telah mencapai angka delapan puluh ribuan. Tidak kurang dari dua ratus guru dari Indonesia setiap tahun dikirimkan ke berbagai negara dengan membawa misi utama, yaitu menyebarkan bahasa Indonesia di negara-negara tujuan.

Berdasarkan tiga program prioritas ini pembangunan melalui kebahasaan dan kesastraan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dititikberatkan. Tiga titik strategis tersebut wajib dioptimalkan dalam rangka membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berkarakter. Oleh karena itu, kondisi umum, dasar hukum, dan potensi dan permasalahan dapat diuraikan sebagai berikut.

1.2 Kondisi Umum

A. Capaian 2015 – 2019

Dalam melaksanakan pembangunan bidang kebahasaan dan kesastraan di Nusa Tenggara Barat periode 2015 – 2019, Kantor Bahasa Provinsi Nusa

Tenggara Barat memiliki sembilan sasaran kegiatan, yakni (1) meningkatnya kosakata bahasa Indonesia, (2) meningkatnya jumlah bahasa dan sastra yang terlindungi, (3) meningkatnya mutu dan jumlah penelitian kebahasaan dan kesastraan, (4) meningkatnya mutu dan jumlah bahan ajar pengayaan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, (5) meningkatnya jumlah instrumen uji kemahiran berbahasa Indonesia, (6) meningkatnya jumlah tenaga profesional dan calon tenaga profesional yang terbina dalam penggunaan bahasa dan sastra, (7) meningkatnya jumlah ruang publik yang terkendali penggunaan bahasanya, (8) meningkatkan mutu dan jumlah bahan pengembangan strategi dan diplomasi kebahasaan, dan (9) terselenggaranya layanan dukungan manajemen teknis di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Sasaran kegiatan yang pertama, meningkatnya kosakata bahasa Indonesia, diukur melalui indikator kinerja kegiatan (IKK) Jumlah Kosakata Indonesia. Pencapaian IKK tersebut dilakukan melalui pengiriman usulan kosakata bahasa daerah yang ada di Nusa Tenggara Barat sebagai kosakata baru bahasa Indonesia. Secara kumulatif capaian IKK Jumlah Kosakata Indonesia adalah sebesar 185% atau 18.518 lema dari 10.000 lema yang telah ditetapkan.

Sasaran kegiatan yang kedua, meningkatnya jumlah bahasa dan sastra yang terlindungi, diukur melalui IKK Jumlah Bahasa dan Sastra yang Terpetakan, Terkonservasi, dan Terevitalisasi. Pencapaian IKK tersebut dilakukan melalui kajian vitalitas, revitalisasi, dan pemetaan bahasa daerah yang ada di Nusa Tenggara Barat. Secara kumulatif capaian IKK Jumlah Bahasa dan Sastra yang Terpetakan, Tekonservasi, dan Terevitalisasi adalah sebesar 110% atau 34 dari 31 naskah yang telah ditetapkan.

Sasaran kegiatan yang ketiga, meningkatnya mutu dan jumlah penelitian kebahasaan dan kesastraan, diukur melalui IKK Jumlah Penelitian Bahasa dan Sastra. Pencapaian IKK tersebut dilakukan melalui penelitian bahasa dan sastra dan publikasi ilmiah bahasa dan sastra. Secara kumulatif capaian IKK Jumlah

Penelitian Bahasa dan Sastra adalah sebesar 131% atau 25 naskah dari 18 naskah yang telah ditetapkan.

Sasaran kegiatan yang keempat, meningkatnya mutu dan jumlah bahan ajar pengayaan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, diukur melalui IKK Jumlah Bahan dan Modul Pembelajaran Bahasa dan Sastra. Pencapaian IKK ini dilakukan melalui penyusunan bahan mulok, bahan literasi, dan sayembara pembuatan buku bacaan dalam rangka penyediaan bahan bacaan untuk mendukung gerakan literasi sekolah. Secara kumulatif capaian IKK Jumlah Bahan dan Modul Pembelajaran Bahasa dan Sastra adalah sebesar 135% atau 70 bahan bacaan dari 54 bahan bacaan yang ditetapkan.

Sasaran kegiatan yang kelima, meningkatnya jumlah instrumen uji kemahiran berbahasa Indonesia, diukur melalui IKK Jumlah Instrumen Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia. Pencapaian IKK ini dilakukan melalui pengusulan baterai soal UKBI dari Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat ke Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Capaian Kumulatif dari IKK ini adalah sebesar 80% atau 4 baterai soal dari 5 baterai soal yang ditetapkan.

Sasaran kegiatan yang keenam, meningkatnya jumlah tenaga profesional dan calon tenaga profesional yang terbina dalam penggunaan bahasa dan sastra, diukur melalui IKK Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional yang Terbina dalam Penggunaan Bahasa dan Sastra dan Jumlah Generasi Muda Pengapresiasi Bahasa dan Sastra. Pencapaian kedua IKK tersebut dilakukan melalui kegiatan penyuluhan, pembinaan, sosialisasi, bimbingan teknis, diseminasi, dan lomba-lomba kebahasaan dan kesastraan dengan sasaran guru Bahasa Indonesia, guru mata pelajaran lainnya, staf pengajar, mahasiswa, dan siswa semua jenjang. Capaian kumulatif IKK ini sebesar 114% atau 11.436 orang dari 10.000 ribu orang yang telah ditetapkan.

Sasaran kegiatan yang ketujuh, meningkatnya jumlah ruang publik yang terkendali penggunaan bahasanya, diukur melalui IKK Jumlah Badan Publik yang Terkendali Penggunaan Bahasanya dan Jumlah Bahasa Swasta yang Terkendali Penggunaan Bahasanya. Pencapaian kedua IKK ini dilakukan

melalui kegiatan Aksi Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik, Lomba Wajah Bahasa Sekolah dan Sektor Pariwisata, dan Diskusi Kelompok Terpumpun dengan Pelaku Media. Capaian kumulatif IKK ini sebesar 107% atau 279 lembaga dari 261 lembaga yang telah ditetapkan.

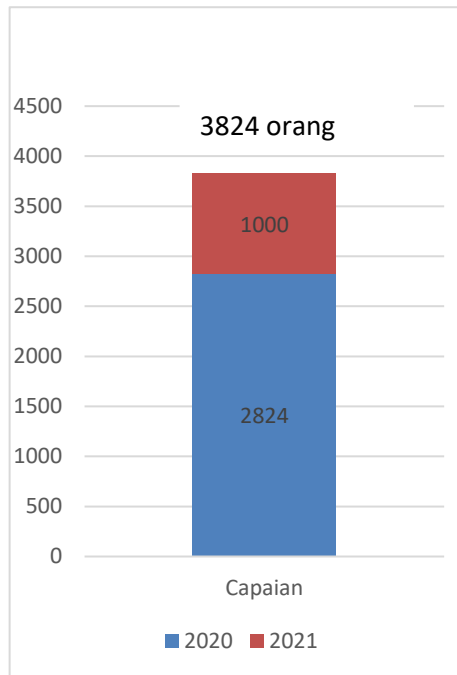
Sasaran kegiatan yang kedelapan, meningkatkan mutu dan jumlah bahan pengembangan strategi dan diplomasi kebahasaan, diukur dari IKK Jumlah Bahan Ajar BIPA. Pencapaian IKK ini dilakukan melalui kegiatan penyusunan bahan ajar BIPA. Sasaran kegiatan dan IKK ini tidak dilaksanakan UPT pada tahun 2018 dan 2019. Capaian kumulatif IKK ini sebesar 60% atau 3 bahan ajar dari 5 bahan ajar yang ditetapkan.

Sasaran kegiatan yang kesembilan, terselenggaranya layanan dukungan manajemen teknis di lingkungan badan bahasa, diukur melalui IKK Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1, Layanan Internal, dan Layanan Perkatoran. Capaian ini IKK ini secara kumulatif adalah nilai SAKIP Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah predikat B.

Berdasarkan data pokok bahasa dan sastra terkini pada tahun 2022, Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki data kebahasaan yang terdiri atas data kamus sebanyak 17 data, ensiklopedia sebanyak 3 data, tesaurus sebanyak 3 data, glosarium sebanyak 4 data, data jurnal dan majalah sebanyak 31 data, data terbitan umum berjumlah 39 data, dan data penyuluhan sebanyak 120 data. Berikutnya data kesastraan, yaitu data bengkel bahasa dan sastra berjumlah 6 data. Selanjutnya data komunitas, yaitu komunitas bahasa dan sastra berjumlah 54 data. Terakhir data penelitian yang dimiliki Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat berjumlah 151 data.

B. Capaian 2020–2024

[SK 1] Meningkatnya Daya Ungkap Bahasa Indonesia

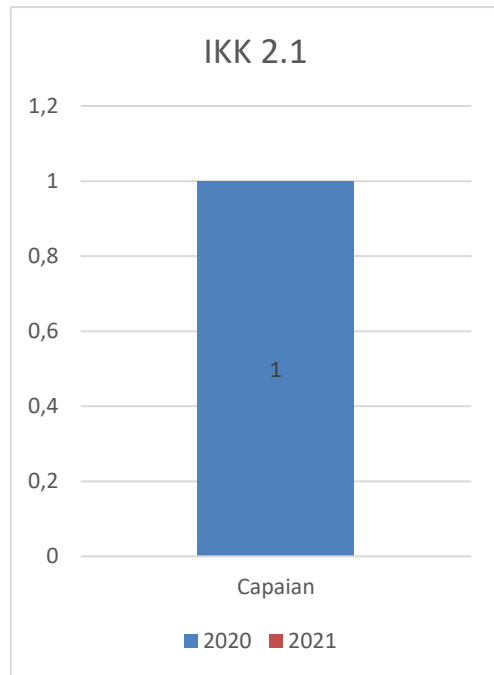


Meningkatnya daya ungkap bahasa Indonesia dapat dilihat dari jumlah kosakata pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Dalam upaya peningkatan jumlah kosakata KBBI Kantor Bahasa Provinsi NTB memberikan dukungan dengan mengusulkan sejumlah kosakata bahasa daerah Nusa Tenggara Barat sebagai bahan pengayaan kosakata pada KBBI. Capaian realisasi sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja kegiatan 1.1 Jumlah Kosakata Bahasa Indonesia. Jumlah kosakata

bahasa Indonesia yang telah dicapai Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2020 sebanyak 2.824 kosakata dengan target 2.000 kosakata dan pada tahun 2021 sebanyak 1.000 kosakata dengan target 1.000 kosakata.

Selain menghimpun dan mengidentifikasi data kosakata, pada tahun 2021 Kantor Bahasa Provinsi NTB juga menyusun Kamus Digital sebagai bentuk inovasi yang berupa pengembangan Kamus Bahasa Daerah NTB. Portal Kamus Bahasa Daerah NTB merupakan pintu gerbang kamus digital Bahasa Daerah NTB. Kamus ini berupa kamus bahasa daerah ke bahasa Indonesia. Pada tahun 2021 kamus digital yang telah dikembangkan dan diintegrasikan ke dalam portal Kamus Bahasa Daerah NTB meliputi Kamus Bahasa Sasak, Samawa, dan Mbojo. Tautan Kamus Bahasa Daerah NTB ini dapat diakses melalui playstore untuk Android atau dengan tautan berikut: <https://kantorbahasantb.kemdikbud.go.id/index.php/kamusdigita>. Sementara itu, tautan di playstore khusus untuk android adalah https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lestari.kamus_bahasa

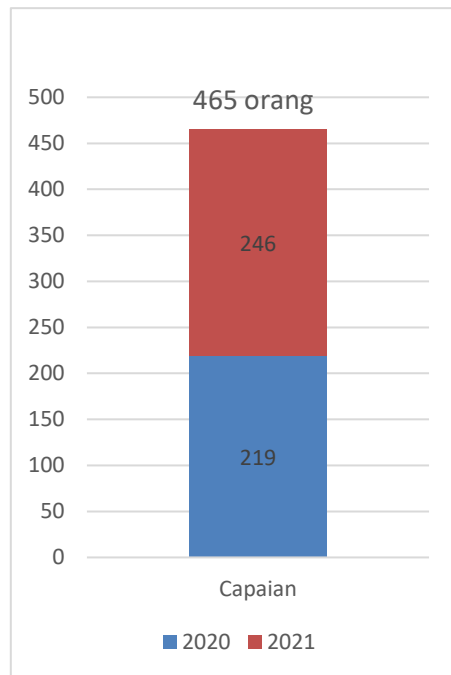
[SK 2] Terwujudnya Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia



Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat menyelenggarakan kegiatan Pelaksanaan Teknis Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra di Daerah dengan menghasilkan keluaran Rekomendasi Bahan Kebijakan Bahasa dan Sastra di Daerah. Sasaran strategis ini capaian realisasinya diukur oleh 1 (satu) indikator kinerja, yakni IKK 2.1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kebahasaan dan

Kesastraan melalui Penelitian. Adapun capaian Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kebahasaan dan Kesastraan melalui Penelitian yang dicapai Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2020 sebanyak 1 dokumen dengan target 5 dokumen dan pada tahun 2021 nomenklatur IKK ini sudah tidak ada sehingga pada tahun 2021 tidak ada capaian untuk IKK ini.

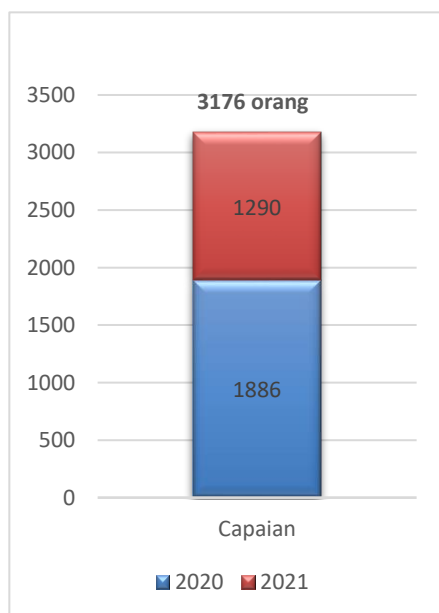
[SK 3] Terwujudnya Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik



Pengutamakan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik merupakan amanah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2019. Pada tahun 2020 dan 2021 Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat melaksanakan beberapa kegiatan yang mendukung terwujudnya sasaran penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Capaian realisasi sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja kegiatan 3.1 Jumlah Lembaga Pengguna Bahasa Indonesia

Terbina. Pada tahun 2020 capaian IKK ini sebanyak 219 lembaga dengan target 192 lembaga dan pada tahun 2021 sebanyak 246 lembaga dengan target 182 lembaga.

[SK4] Meningkatnya Jumlah Penutur Bahasa Terbina



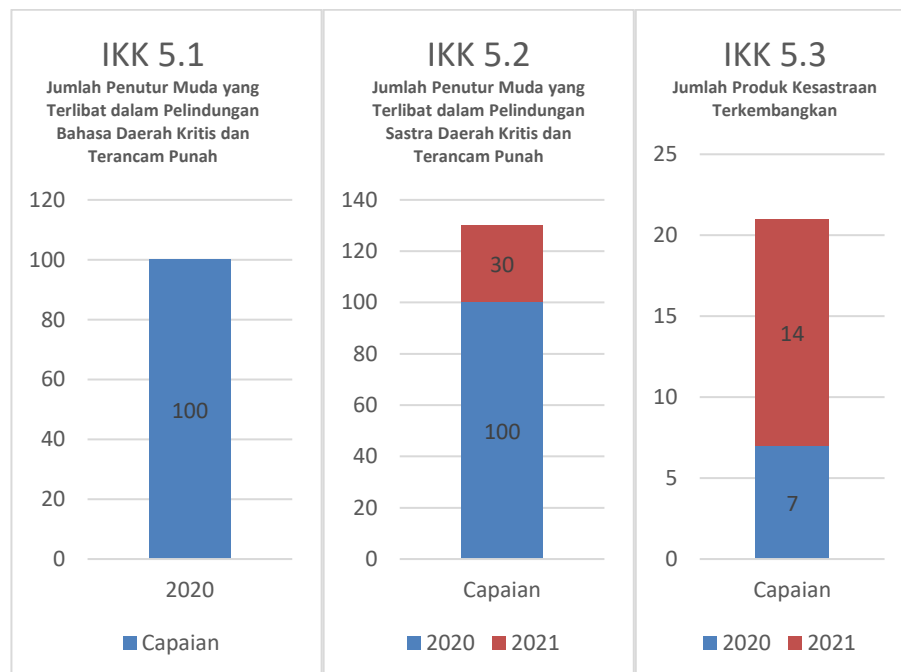
Peningkatan penutur bahasa merupakan suatu upaya pembinaan bahasa Indonesia yang sasaran utamanya adalah para tenaga profesional dan calon tenaga profesional, baik di lingkungan instansi pemerintah, swasta, maupun generasi muda. Capaian realisasi ini diukur berdasarkan indikator kinerja kegiatan 4.1 Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional yang Terbina Kemahiran Berbahasa dan Bersastra. Pada tahun 2020, capaian Kantor

Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat sebanyak 1.886 orang dari target

sebanyak 1.515 orang. Capaian IKK ini dipenuhi dari tiga luaran, yaitu (1) Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional Terbina Kemahiran Berbahasa Indonesia sebanyak 420 orang, (2) Gerakan Literasi Nasional (GLN) di daerah sebanyak 740 orang, dan (3) Generasi Muda Pengapresiasi Bahasa dan Sastra sebanyak 746 orang.

Pada tahun 2021 capaian Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat sebanyak 1290 orang dari target awal sebanyak 704 orang. Capaian IKK ini dipenuhi dari empat luaran, yaitu (1) Peningkatan Literasi Generasi Muda sesuai target, yaitu 150 orang, (2) Pelaksanaan UKBI melebihi target, yaitu 34 orang dari target 24 orang dan UKBI Adaptif tercapai sesuai target yaitu 8.000 orang, (3) Peningkatan Kemahiran Berbahasa sesuai dengan target 200 orang, dan (4) Peningkatan Apresiasi Sastra melebihi target, yaitu 550 dari target 480 orang.

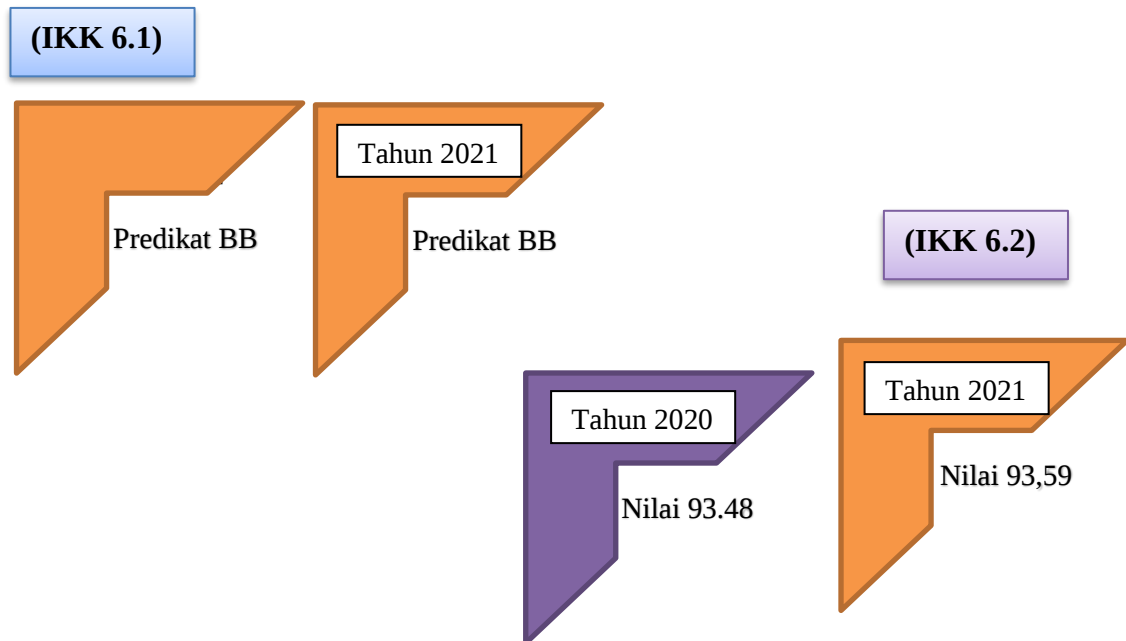
[SK5] Terlindunginya Bahasa dan Sastra Daerah yang Kritis dan Terancam Punah



Perlindungan bahasa dan sastra daerah yang terancam punah bertujuan untuk meningkatkan status bahasa dan sastra yang statusnya kritis dan terancam punah menjadi (minimal) berstatus mengalami kemunduran. Pengukuran capaian Sasaran Kegiatan Terlindunginya Bahasa dan Sastra Daerah yang Kritis dan Terancam dicapai melalui tiga Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu IKK 5.1 Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Bahasa Daerah Kritis dan Terancam Punah, IKK 5.2 Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Sastra Daerah Kritis dan Terancam Punah, serta IKK 5.3 Jumlah Produk Kesastraan Berkembangkan.

Adapun capaian Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk IKK 5.1 Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Sastra Daerah Kritis dan Terancam Punah pada tahun 2020 sebanyak 100 orang dari target 100 orang, sedangkan pada tahun 2021 tidak mengadakannya. IKK 5.2 Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Bahasa Daerah Kritis dan Terancam Punah capaian pada tahun 2020 sebanyak 100 orang dari target 100 orang dan pada tahun 2021 sebanyak 30 orang dari target 30 orang. Sementara itu, capaian IKK 5.3 Jumlah Produk Kesastraan Berkembangkan pada tahun 2020 sebanyak 7 produk sastra dari target 7 dan produk sastra pada tahun 2021 sesuai target, yaitu sebanyak 14 produk sastra.

[SK 6] Meningkatnya Tata Kelola Satuan Kerja di Lingkungan Badan Bahasa



Pengukuran capaian Sasaran Kegiatan Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa diukur melalui dua Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu IKK 6.1 Predikat SAKIP Satker minimal BB dan IKK 6.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 91. Capaian predikat SAKIP Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2020 adalah BB dan tahun 2021 juga mendapat BB. Sementara itu, capaian Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2020 mendapat nilai 93,48 dari target 91 dan tahun 2021 mendapat nilai 93,59 dari target 91.

C. Pokok-pokok Perubahan dalam Renstra Kantor Bahasa Provinsi NTB 2020 – 2024

Rencana Strategis Kantor Bahasa Provinsi NTB Tahun 2020 – 2024 direviu dan diselaraskan agar mampu menjawab tantangan perubahan. Hadirnya beberapa kebijakan mutakhir ditindaklanjuti dengan penyelarasan berbagai dokumen perencanaan, termasuk Renstra. Dalam dokumen ini, perubahan dilakukan terhadap beberapa hal berikut.

No.	Struktur (Permen PPN/Bappenas No. 5 Tahun 2019)	Renstra	
		Semula	Menjadi
1.	BAB I Pendahuluan		
	1.1 Kondisi Umum	Capaian Umum	Capaian 2020—2021
	1.3 Permasalahan dan Potensi	Permasalahan diurai berdasarkan kekuatan, kelemahan, potensi, dan ancaman (analisis SWOT)	Pemutakhiran uraian kekuatan, kelemahan, potensi, dan ancaman sesuai kondisi saat ini
2.	BAB II Visi, Misi, dan Tujuan		
		a. Mencantumkan visi Presiden yang diturunkan menjadi visi Kemendikbud	Mencantumkan visi Presiden yang diturunkan menjadi visi Kemendikbudristek, BPP Bahasa, dan Balai Bahasa Provinsi Papua
		b. Narasi misi serupa dengan visi	Penajaman dan penyelarasan misi, tujuan, dan sasaran
		c. Terdapat indikator keberhasilan visi	Dihapus
		d. Terdapat indikator keberhasilan tujuan strategi	Dihapus
		e. Terdapat tujuan kegiatan	Penyelarasan tujuan kegiatan dengan sasaran program BPP Bahasa
		f. Terdapat sasaran kegiatan	Penyelarasan sasaran kegiatan dengan tujuan kegiatan
		g. Tidak terdapat <i>cascading</i> antara SS, SP, dan SK	Memunculkan <i>cascading</i> antara SS, SP, dan SK
3.	BAB III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan		
		1. Arah kebijakan BPP Bahasa disajikan secara umum	Arah kebijakan difokuskan pada tiga prioritas (literasi, perlindungan bahasa daerah, dan internasionalisasi bahasa Indonesia)
		2. Strategi pelaksanaan program disajikan secara umum	Strategi pelaksanaan program diuraikan berbasis Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional (KKLP)
		3. Arah kebijakan dan strategi pelaksanaan kegiatan BBPP disajikan secara umum	Arah kebijakan difokuskan pada mendukung tercapaian sasaran strategis BPP Bahasa dengan strategi pelaksanaan kegiatan berbasis KKLP

No.	Struktur (Permen PPN/Bappenas No. 5 Tahun 2019)	Renstra	
		Semula	Menjadi
		4. Kerangka regulasi belum mencakupi kebutuhan mutakhir	Penambahan beberapa usulan dalam kerangka regulasi, termasuk tentang Widyabasa
		5. Kerangka kelembagaan digambarkan secara umum	Kerangka kelembagaan dibuat lebih spesifik berdasarkan kriteria tertentu, misal jabatan atau pangkat golongan
4.	BAB IV Target Kinerja dan Kerangka Kelembagaan		
		Sasaran dan indikator kinerja sesuai dengan Permendikbud No. 22 Tahun 2020	Sasaran dan indikator kinerja sesuai dengan Permendikbud No. 13 Tahun 2022 Sasaran dan indikator dipertajam dengan mengacu pada tiga prioritas utama BPP Bahasa (literasi, perlindungan bahasa daerah, dan internasionalisasi bahasa Indonesia)
5.	BAB V Penutup		
		-	Perubahan redaksional
6.	Lampiran		
		Definisi operasional	1. Definisi operasional 2. Matriks a. <i>Cascading</i> b. Matriks Semula-Menjadi sasaran dan indikator

Berikut ini adalah keseluruhan faktor tersebut.



Berdasarkan hasil evaluasi faktor internal dan faktor eksternal dari setiap faktor pada analisis SWOT di atas. Ditetapkan masalah dan potensi prioritas yang harus menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan program di Kantor Bahasa Provinsi NTB sebagai berikut.

Masalah

1. Adanya wilayah di Provinsi NTB yang menjadi daerah 3T (Tertinggal, Terpencil, dan Terluar). Selain itu tingkat minat baca di Provinsi NTB sangat rendah. Secara nasional, NTB berada pada peringkat 31 dari 34 provinsi di Indonesia.
2. Regulasi tentang kebahasaan dan kesastraan di Indonesia yang cukup lengkap. Namun, dalam realitasnya, regulasi kebahasaan dan kesastraan yang sudah ada tersebut belum sepenuhnya terimplementasi khususnya di wilayah NTB.
3. Masih kurangnya SDM tenaga teknis yang menjadi ahli bahasa, seperti ahli forensik, penyunting, penyuluh, dan ahli bahasa perundang-undangan.
4. Luasnya wilayah kerja Kantor Bahasa Provinsi NTB yang berdampak pada layanan kebahasaan yang diberikan belum dapat menjangkau seluruh wilayah yang ada di NTB.
5. Jumlah bahasa daerah yang ada di NTB mencapai 11 bahasa, tetapi pemerintah daerah sebagai pelaku utama dalam perlindungan bahasa dan sastra daerah belum sepenuhnya menjadikan program perlindungan bahasa dan sastra daerah sebagai prioritas utama.
6. Dalam konteks internasionalisasi bahasa Indonesia, Standar Kompetensi Lulusan BIPA belum terimplementasi secara penuh.

Strategi

1. Memberdayakan komunitas literasi yang ada di NTB untuk mendukung Gerakan Literasi Nasional.

2. Penguatan implementasi regulasi kebahasaan dan kesastraan di Indonesia dalam rangka pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra.
3. Optimalisasi kualitas SDM tenaga teknis yang ada di Kantor Bahasa Provinsi NTB melalui berbagai macam pelatihan.
4. Penguatan digitalisasi layanan kebahasaan dan kesastraan sehingga dapat menjangkau seluruh wilayah yang ada di NTB.
5. Mendorong pemerintah daerah untuk dapat menerbitkan peraturan daerah terkait perlindungan bahasa dan sastra daerah.
6. Strategi internasionalisasi bahasa Indonesia harus dilakukan dengan pendekatan baru yang lebih agresif.



Bab II

Tujuan dan Sasaran

CANTIK
Cepat, Akuntabel, Netral,
Transparan, Inovatif, dan Kredibel



BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

2.1 Visi

Visi Kantor Bahasa Provinsi NTB mengikuti visi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tahun 2020 – 2024 dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diturunkan dari visi Presiden,

“Mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian ber- landaskan gotong royong melalui terciptanya pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, ber- gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif dengan bahasa dansastra”

Dari rumusan visi di atas, Indonesia maju terwujud ketika bangsa Indonesia ber- daulat, mandiri, dan berkepribadian dengan tetap berpijak pada semangat gotong royong. Hal itu diejawantahkan dalam bidang kebahasaan dan kesastraan untuk membentuk sumber daya manusia Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional.

2.2 Misi

Untuk mencapai visi, Kantor Bahasa Provinsi NTB mengikuti misi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 5 tahun ke depan yang sudah ditetapkan Kemendikbudristek sebagai berikut.

1. Mewujudkan literasi kebahasaan dan kesastraan serta

pengarusutamaan bahasa dan sastra dalam Pendidikan.

2. Mewujudkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional
3. Mewujudkan kelestarian bahasa daerah
4. Mengoptimalkan tata kelola Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang partisipatif, transparan, dan akuntabel

2.3 Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang diturunkan dari visi dan misi presiden, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa berfokus pada tujuan Kemendikbudristek, terutama dalam hal *pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa, dan sastra serta pengarusutamaannya dalam pendidikan*.

Kode	Tujuan dan Indikator	Satuan	Target			
			Baseline	2022	2023	2024
SS 3	Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan					
IKSS 3.1	Indeks kemahiran berbahasa Indonesia	indeks	57	69	75	81
SS 5	Meningkatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel					
IKK 5.3	Predikat SAKIP Kemendikbudristek	predikat	BB	BB	A	A

Untuk mendukung dan mencapai tujuan tersebut, Kantor Bahasa Provinsi NTB menetapkan Indikator Kinerja Tujuan (IKT). Penetapan IKT berpatokan pada Indikator Kinerja Program (IKP) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Penetapannya disesuaikan dengan tugas dan fungsi Kantor Bahasa Provinsi NTB. IKT tersebut terdiri atas empat (empat) hal sebagai berikut.

- 1 Meningkatnya literasi kebahasaan dan kesastraan;
- 2 Meningkatnya Peran Bahasa Indonesia di Kancah Internasional;
- 3 Meningkatnya Kelestarian Bahasa Daerah;
- 4 Meningkatnya Akuntabilitas Layanan dan Pengelolaan Anggaran Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Nomor	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan		
		Indikator	Satuan	Target 2024
1	Meningkatnya literasi kebahasaan dan kesastraan	Persentase penutur bahasa Indonesia terbinayangmeningkat kualitas berbahasanya	Persentase	72
		Persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya	Persentase	91,99
2	Meningkatnya Peran Bahasa Indonesia di Kancah Internasional	Jumlah negara yang mengajarkan bahasa Indonesia	Negara	50
3	Meningkatnya Kelestarian Bahasa Daerah	Indeks pemanfaatan bahasa daerah oleh penuturnya	Indeks	20,54
4	Meningkatnya Akuntabilitas Layanan dan Pengelolaan Anggaran Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Predikat	A

Adapun target Indikator Kinerja Tujuan Kantor Bahasa Provinsi NTB sesuai dengan target akhir renstra tahun 2024 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

2.4 Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran
1	Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra	Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam gerakan literasi kebahasaan dan kesastraan	Jumlah penutur bahasa yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan
3	Terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan	Jumlah lembaga yang terbina penggunaan bahasanya
		Jumlah komunitas penggerak literasi yang terbina
4	Meningkatnya jumlah pemelajar BIPA	Jumlah pemelajar bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA)
5	Tersedianya produk diplomasi bahasa	Jumlah produk penerjemahan
6	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan bahasa dan sastra daerah	Jumlah partisipan perlindungan bahasa dan sastra daerah
7	Meningkatnya tata kelola Kantor Bahasa Provinsi NTB	Predikat SAKIP Kantor Bahasa Provinsi NTB
		Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Kantor Bahasa Provinsi NTB

Dalam rangka mengukur tingkat ketercapaian tujuan, Kantor Bahasa Provinsi NTB berpedoman Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020

tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020–2024. Sasaran-sasaran tersebut diuraikan dari revisi Renstra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2020–2024 sebagai berikut.

Berdasarkan penahapan pencapaian sasaran strategis 2020–2024, sasaran kinerja Kantor Bahasa Provinsi NTB tahun 2020–2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Kode	SK/IKK	Satuan	Target Renstra		
			2022	2023	2024
SK 1	Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra				
IKK 1.1	Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra	produk	2	2	2
SK 2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam gerakan literasi kebahasaan dan kesastraan				
IKK 2.1	Jumlah penutur bahasa yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan	orang	806	831	857
SK 3	Terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan				
IKK 3.1	Jumlah lembaga yang terbina penggunaan bahasanya	lembaga	45	45	45
IKK 3.2	Jumlah komunitas penggerak literasi yang terbina	lembaga	31	31	31
SK 4	Meningkatnya jumlah pemelajar BIPA				
IKK 4.1	Jumlah pemelajar bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA)	orang	25	25	25

SK 5	Tersedianya produk diplomasi bahasa			
IKK 5.1	Jumlah produk penerjemahan	produk	10	58
SK 6	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan bahasa dan sastra daerah			
IKK 6.1	Jumlah partisipan perlindungan bahasa dan sastra daerah	orang	273	274
SK 7	Meningkatnya tata kelola Kantor Bahasa Provinsi NTB			
IKK 7.1	PredikatSAKIP Kantor Bahasa Provinsi NTB	predikat	BB	BB
IKK 7.2	Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA- K/L Kantor Bahasa Provinsi NTB	nilai	91	91



Si
Kika

Kijang Mandalika

Bab III

Arah Kebijakan, Strategi
Kerangka Regulasi, dan
Kerangka Lembaga

CANTIK

Cepat, Akuntabel, Netral,
Transparan, Inovatif, dan Kredibel



BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA LEMBAGA

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan dan strategi Kantor Bahasa Provinsi NTB mengacu pada arah kebijakan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sesuai dengan kebijakan dan strategi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, terutama dalam mewujudkan pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan. Arah kebijakan ditujukan pada tiga fokus utama, yaitu

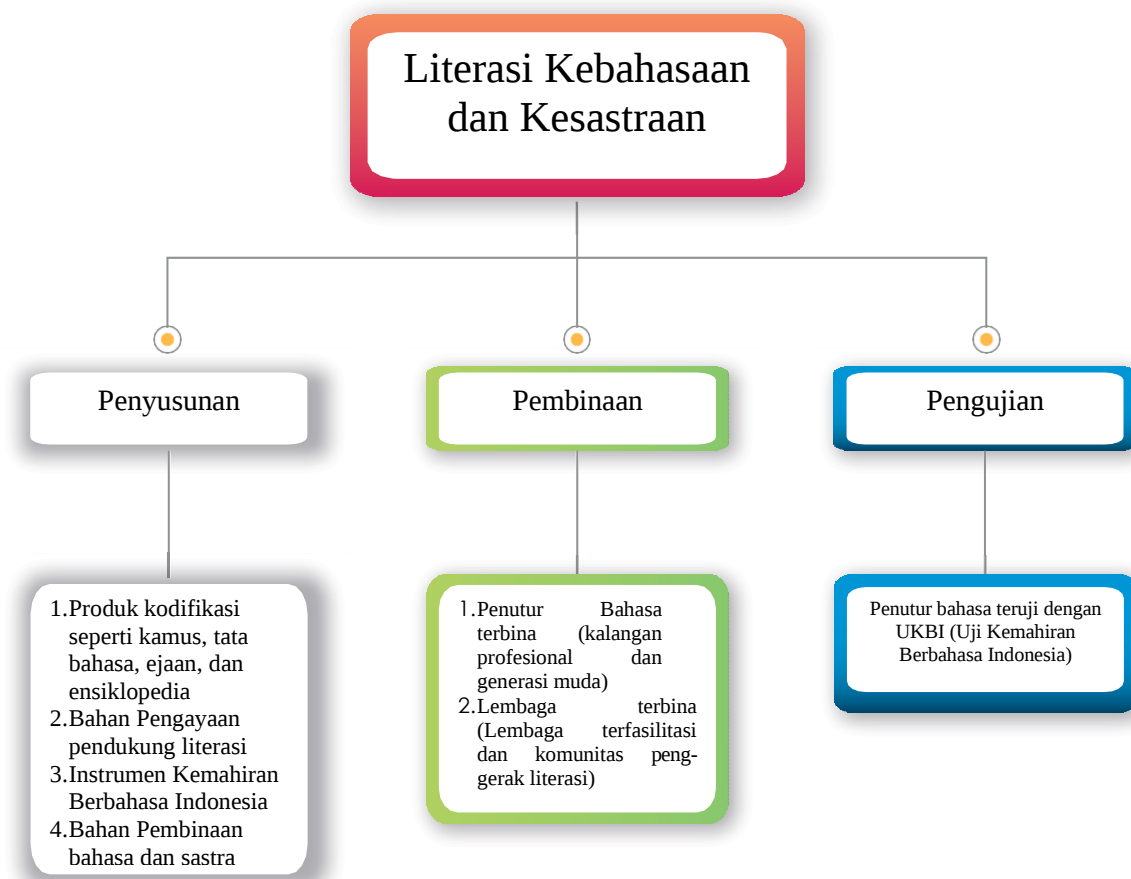
1. penguatan literasi kebahasaan dan kesastraan,
2. pelindungan bahasa dan sastra daerah, dan
3. internasionalisasi bahasa Indonesia.



Fokus kebijakan pertama ialah penguatan literasi kebahasaan dan kesastraan. Literasi kebahasaan dan kesastraan merupakan salah satu upaya BPP Bahasa menciptakan ekosistem masyarakat Indonesia yang berbudaya literasi (terutama baca-tulis). Literasi secara operasional dapat dipahami sebagai kemampuan

membaca dan menulis, baik teks maupun nonteks, yang dilakukan secara kritis untuk meningkatkan kecakapan hidup sumber daya manusia. Penguatan literasi kebahasaan dan kesastraan diarahkan pada dua ranah, yaitu dunia pendidikan dan masyarakat umum. Penguatan literasi dalam dunia pendidikan bertujuan untuk meningkatkan minat baca dan nalar kritis siswa, sedangkan penguatan literasi masyarakat umum bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang literat.

Dalam implementasinya, penguatan literasi kebahasaan dan kesastraan mencakup penyusunan bahan pengayaan literasi, pembinaan bahasa dan sastra, serta pengujian bahasa. Dalam hal penyusunan untuk penyediaan bahan pengayaan literasi, terdapat beraneka produk kebahasaan dan kesastraan yang dihasilkan oleh BPP Bahasa dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas, misalnya kamus, tesaurus, tata bahasa, buku bacaan literasi, dan bahan pembinaan bahasa. Sementara itu, dalam hal pembinaan masyarakat, terdapat berbagai aktivitas yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas berbahasa masyarakat, misalnya pembinaan penutur bahasa, pembinaan lembaga (termasuk komunitas), layanan ahli bahasa, serta pengujian kemahiran berbahasa Indonesia.



Fokus kebijakan kedua ialah perlindungan bahasa dan sastra daerah. Pelindungan bahasa dan sastra daerah merupakan upaya menjaga bahasa dan sastra daerah agar tidak punah. Hal itu dilandasi pemahaman bahwa ketika sebuah bahasa punah, dunia kehilangan warisan yang sangat berharga sejumlah besar pengetahuan termasuk kearifan lokal, legenda, dan puisi yang terhimpun dari generasi ke generasi akan ikut punah. Berkaitan dengan hal itu, berbagai aktivitas dilaksanakan dalam rangka melindungi bahasa daerah, yaitu pemetaan bahasa, kajian daya hidup bahasa, konservasi, revitalisasi, dan registrasi.

Dari berbagai aktivitas perlindungan bahasa daerah, prioritas dalam renstra periode ini diarahkan pada upaya menumbuhkan penutur muda melalui revitalisasi bahasa daerah. Revitalisasi merupakan langkah strategis dalam rangka menggelorakan kembali penggunaan bahasa daerah dalam berbagai ranah kehidupan sehari-hari melalui cara yang menyenangkan.

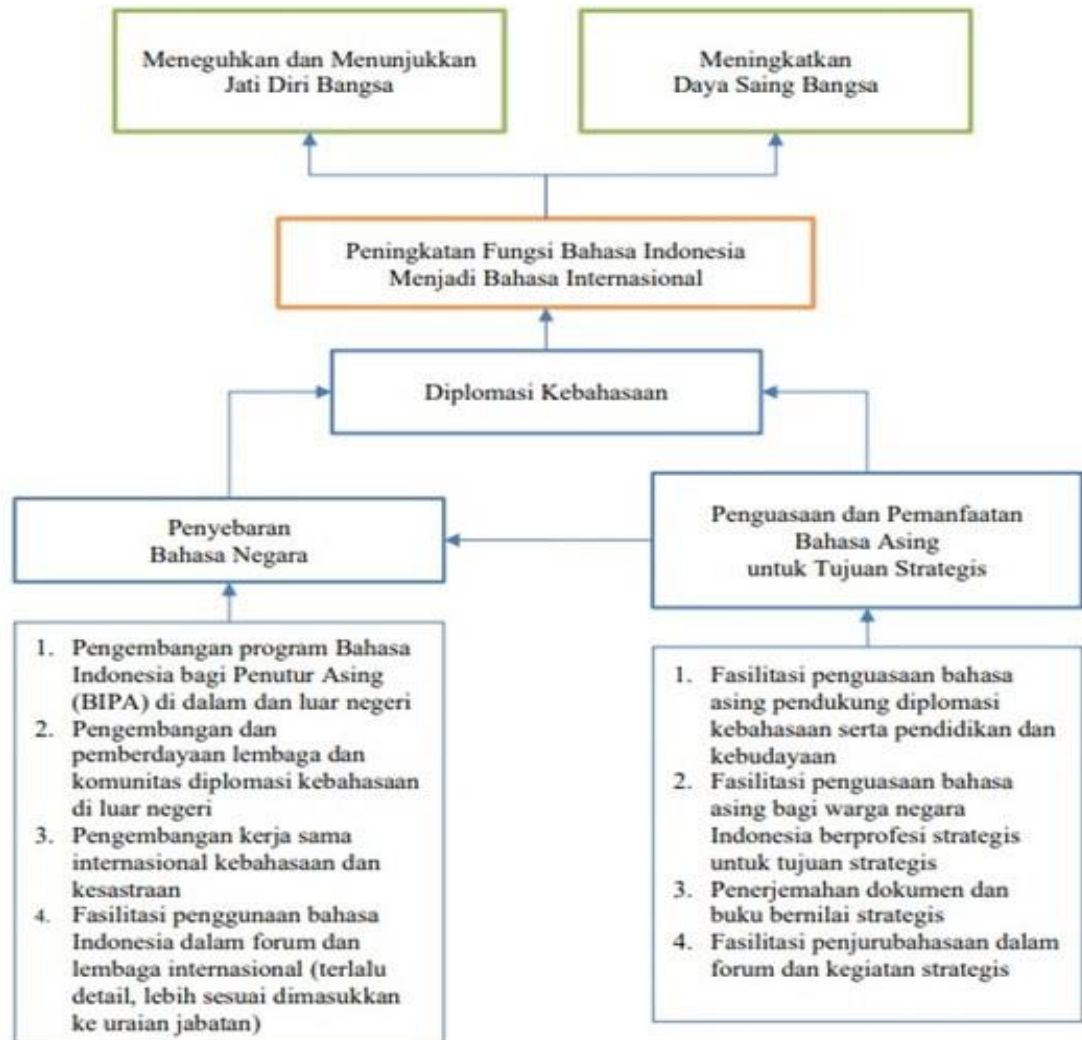
Revitalisasi juga merupakan upaya menjamin hak masyarakat adat untuk melestarikan dan mempromosikan bahasa mereka serta mengarusutamakan keragaman bahasa ke dalam semua agenda pembangunan.

Strategi baru yang ditempuh dalam rangka revitalisasi bahasa daerah diuraikan dalam Merdeka Belajar Episode 17 yang diluncurkan oleh Mendikbudristek pada 22 Februari 2022. Strategi baru ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yaitu pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, MGMP, KKG, pengawas, kepala sekolah, guru, siswa, pegiat, maestro, media massa, duta bahasa, dan keluarga. Dalam implementasinya, revitalisasi bahasa dilaksanakan berdasarkan model yang sesuai dengan situasi kebahasaan di wilayah tertentu.

Fokus kebijakan ketiga berkaitan dengan internasionalisasi bahasa Indonesia. Internasionalisasi bahasa Indonesia merupakan upaya peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Untuk mewujudkan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, strategi *Lingua Franca Plus* ditempuh melalui peningkatan penyebaran bahasa Indonesia di berbagai ranah penggunaan. Hal ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan pendidikan, kebudayaan, pariwisata, olahraga, ekonomi, investasi, politik, diplomasi, pertahanan, dan keamanan. Melalui pendekatan pendidikan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melaksanakan program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) dan penerjemahan.

Program BIPA merupakan salah satu upaya diplomasi kebahasaan yang dilakukan dengan menyebarkan bahasa negara melalui jalur pendidikan. Dalam pengembangan program BIPA, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa memiliki peran dalam penyusunan regulasi serta pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi secara kelembagaan kepada penerima manfaat dan pemangku kepentingan. Sasaran akhir fasilitasi kelembagaan itu adalah pemelajar BIPA, baik di dalam maupun di luar negeri. Fasilitasi BIPA di luar

negeri secara langsung juga berdampak pada negara yang lembaga di dalamnya mengajarkan bahasa Indonesia.



Program lain yang menjadi bagian dari upaya internasionalisasi bahasa Indonesia adalah program penerjemahan dan penjurubahasaan. Untuk mendukung upaya tersebut, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melaksanakan program penerjemahan buku dari bahasa asing ke bahasa Indonesia dan sebaliknya. Penerjemahan bahasa asing ke bahasa Indonesia dilaksanakan untuk mendukung pembelajaran BIPA. Sementara itu, penerjemahan buku dari bahasa Indonesia ke bahasa asing dilakukan

untuk menyebarkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia ke masyarakat global. Untuk merealisasikan program tersebut, dibutuhkan sumber daya manusia yang handal, baik di Badan Bahasa secara khusus maupun di masyarakat. Dalam konteks ini, Badan Bahasa telah bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk menerbitkan lima Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bagi penerjemah dan juru bahasa.

3.2 Kerangka Regulasi

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa membutuhkan kerangka regulasi sebagai landasan hukum formal. Daftar regulasi dan urgensi pembentukannya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan	Target Penyelesaian
1.	RSKKNI bidang pengajaran BIPA	Penguatan tentang Standar Kompetensi Pengajar BIPA	2022
2.	Peraturan tentang standar penyelenggaraan program BIPA	Penguatan regulasi yang mengatur standar penyelenggaraan program BIPA	2024
3.	Peraturan tentang peta jalan internasionalisasi bahasa Indonesia	Sebagai rujukan pelaksanaan program penginternasionalan bahasa indonesia	2023

4.	Peraturan tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Penerjemah Teks Sastra	Penjaminan mutu penerjemah dan terjemahan tekssastra	2022
5.	Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Bidang Penerjemahan dan Penjurubahasaan	Pelaksanaan aturan tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional dalam bidang penerjemahan dan penjurubahasaan	2023
6.	Revisi Permendikbud Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia	UKBI masih bersifat imbauan dan belum diwajibkan bagi masyarakat Indonesia yang berpendidikan dan berbudaya	2023
7.	Peraturan tentang Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia	Penguatan kebijakan BPP Bahasa dalam pengawasan bahasa untuk melaksanakan Pasal 42 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia	2023

8.	Peraturan tentang Pedoman dan Acuan Kebahasaan	Penyempurnaan PUEBI, PUIPI, dan pedoman lainnya	2022
9.	Revisi PP Nomor 82 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak	Pengurangan tarif mahasiswa dan penyesuaian tarif penutur asing	2023
10.	Peraturan tentang tarif PNBPN di lingkungan Kemendikbudristek	Penambahan tarif nol dalam PNBPUKBI sangat penting untuk mewujudkan peningkatan kemahiran mahasiswa dan pemangku kebijakan	2023
11.	Peraturan tentang Standar Kompetensi Pekamus dan Penata Istilah	Penguatan kebijakan BPP Bahasa dalam fungsi pengembangan Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah	2024
12.	Peraturan tentang Standar Kompetensi Pembaku dan Pengodifikasi Kaidah Bahasa Indonesia	Pentingnya aturan mengenai Standar Kompetensi Penyusun Kaidah Bahasa Indonesia	2024
13.	Revisi Permendikbud 44 Nomor 2020 tentang Bantuan Pemerintah di	Penambahan sasaran penerima banpem agar mencakupi juga komunitas kebahasaan dan	2022

	Lingkungan Kemendikbudristek	kesastraan	
14.	Perpres tentang Pembudayaan Literasi	Tindaklanjut UU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, serta PP Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2017	2024
15.	Permendikbudristek tentang pedoman kebutuhan jabatan fungsional Widyabasa	Sebagai pedoman bagi unit kerja dalam melakukan penghitungan kebutuhan jabatan fungsional Widyabasa	2022
16.	Perpres tentang tunjangan fungsional Widyabasa	Sebagai acuan menentukan besaran jumlah tunjangan fungsional jabatan fungsional Widyabasa	2023
17.	Permendikbudristek tentang uji kompetensi jabatan fungsional Widyabasa	Sebagai acuan terkait kompetensi yang dibutuhkan pegawai untuk menduduki jabatan fungsional Widyabasa	2022

18.	Permendikbudristek tentang pedoman inpassing jabatan fungsional Widyabasa	Sebagai acuan dalam menentukan proses inpassing jabatan fungsional Widyabasa	2022
19.	Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 5 tahun 2020 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah	Sebagai acuan dalam Melaksanakan pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra daerah di NTB	2020

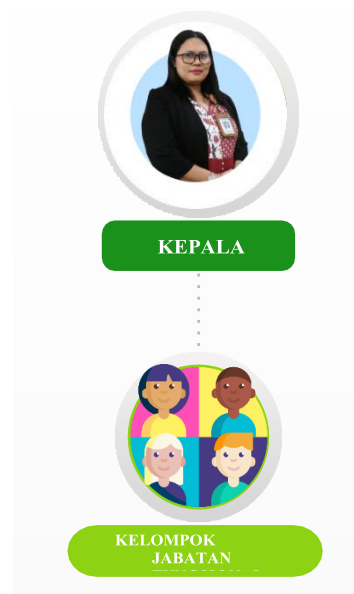
3.3 Kerangka Kelembagaan

Kantor Bahasa Provinsi NTB harus didukung dengan kerangka kelembagaan yang mencakup struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara yang efektif dan efisien, agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada Kantor Bahasa Provinsi NTB. Kerangka kelembagaan dimaksudkan agar penataan organisasi sejalan dan mendukung pencapaian sasaran strategis Kemdikbudristek, serta mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi, ketepatan proses (tata laksana) organisasi, serta pencegahan duplikasi tugas dan fungsi organisasi.

Struktur organisasi Kantor Bahasa Provinsi NTB sesuai Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Balai Bahasa dan Kantor Bahasa berdasarkan Permendikbudristek Nomor 12

Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Balai Bahasa dan Kantor Bahasa, Kantor Bahasa mempunyai tugas melaksanakan perlindungan dan pemasyarakatan bahasa dan sastra Indonesia di wilayah kerjanya. Dalam melaksanakan tugas, Kantor Bahasa menyelenggarakan fungsi:

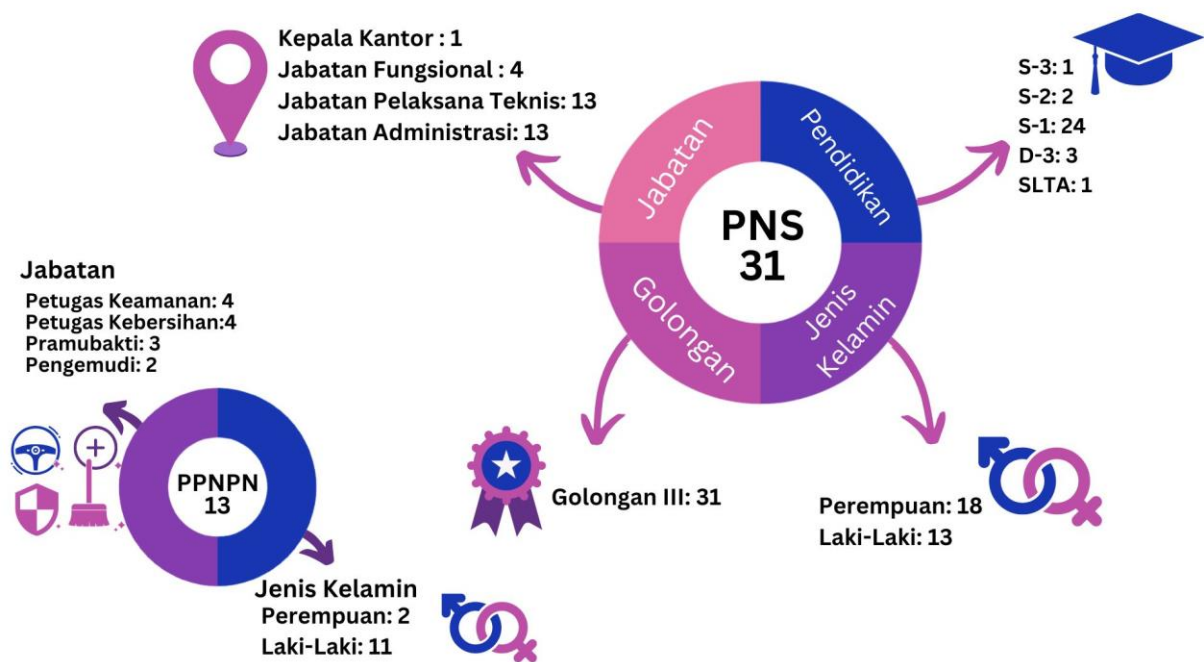
- a. pelaksanaan pemetaan bahasa dan sastra daerah di wilayah kerjanya;
- b. pelaksanaan inventarisasi kosakata dan karya sastra di wilayah kerjanya;
- c. pelaksanaan konservasi dan revitalisasi bahasa dan sastra daerah di wilayah kerjanya;
- d. pelaksanaan pemasyarakatan bahasa Indonesia di wilayah kerjanya;
- e. pelaksanaan fasilitasi perlindungan dan pemasyarakatan bahasa dan sastra daerah di wilayah kerjanya;
- f. pemberian layanan kebahasaan dan kesastraan di wilayah kerjanya;
- g. pelaksanaan kemitraan di bidang kebahasaan dan kesastraan;
- h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kebahasaan dan kesastraan di wilayah kerjanya; dan
- i. pelaksanaan urusan administrasi.



Secara kelembagaan, Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat didukung oleh 31 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 14 orang Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri (PPNPN). Jabatan PNS di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri atas 1 orang kepala kantor, 4 orang pejabat fungsional, 13 orang pelaksana teknis, dan 13 orang jabatan administrasi. Berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai dengan tingkat pendidikan S-3 berjumlah 1 orang, S-2 berjumlah 2 orang, S-1 berjumlah 24 orang, D-3 berjumlah 3 orang, dan SLTA berjumlah 1 orang. Berdasarkan jenis kelamin, terdapat 18 orang PNS perempuan dan 13 orang PNS laki-laki. Saat

ini, seluruh pegawai PNS berstatus golongan III.

Sementara itu, pegawai PPNPN terdiri atas 3 pramubakti, 4 petugas keamanan, 4 petugas kebersihan, dan 2 pengemudi. Berdasarkan jenis kelamin, terdapat 2 orang PPNPN perempuan dan 11 orang PPNPN laki-laki. Secara rinci, kondisi sumber daya manusia di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat dilihat pada infografis di bawah ini.



Rincian PNS di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat		
Jabatan	Kepala Kantor	1 orang
	Jabatan Fungsional	4 orang
	Jabatan Pelaksana Teknis	13 orang
	Jabatan Administrasi	13 orang
Pendidikan	S-3	1 orang
	S-2	2 orang
	S-1	24 orang
	D-3	3 orang
	SLTA	1 orang
Golongan	III	31 orang
Jenis Kelamin	Laki-Laki	13 orang
	Perempuan	18 orang
Rincian PPNN di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat		
Jabatan	Pramubakti	3 orang
	Petugas Keamanan	4 orang
	Petugas Kebersihan	4 orang
	Pengemudi	2 orang
Jenis Kelamin	Laki-Laki	13 orang
	Perempuan	18 orang



Si
Kika

Kijang Mandalika

Bab IV

Target Kinerja dan
Kerangka Pendanaan

CANTIK

Cepat, Akuntabel, Netral,
Transparan, Inovatif, dan Kredibel



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan oleh Kantor Bahasa Provinsi NTB serta mendukung tercapainya kinerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa ditetapkan sasaran-sasaran yang merupakan kondisi yang ingin dicapai dari pembangunan bidang kebahasaan. Target kinerja dan target pendanaan periode 2022 – 2024 sudah ditentukan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Keberhasilan sasaran diukur dengan indikator-indikator kinerja. Di bab ini, sasaran dan indikator kinerja ditampilkan berdasarkan dua periode pelaksanaan, yaitu (1) sasaran dan indikator tahun 2020 – 2021 dan (2) sasaran dan indikator tahun 2022 – 2024.

4.1.1 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2020 – 2021

Pada periode 2020 – 2021, terdapat sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan serta target kinerja sebagai berikut.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target	
					2020	2021
1	Meningkatnya daya ungkap bahasa Indonesia	1.1	Jumlah kosakata bahasa Indonesia	kosakata	2000	1000
2	Terwujudnya standar kemahiran	2.1	Jumlah rekomendasi kebijakan kebahasaan dan	dokumen	1	-

	berbahasa Indonesia		kesastraan melalui penelitian			
3	Terwujudnya Penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik	3.1	Jumlah lembaga pengguna bahasa Indonesia terbina	lembaga	192	182
4	Meningkatnya jumlah penutur bahasa	4.1	Jumlah tenaga professional dan calon tenaga professional terbina kemahiran berbahasa dan bersastra	orang	1515	704
5	Terlindunginya bahasa dan sastra daerah yang kritis dan terancam punah	5.1	Jumlah penutur muda yang terlibat dalam perlindungan bahasa daerah kritis dan terancam punah	orang	100	30
		5.2	Jumlah penutur muda yang terlibat dalam perlindungan sastra daerah kritis dan terancam punah	orang	100	-
		5.3	Jumlah produk sastra terkembangkan	sastra	7	14
6	Meningkatnya tata kelola	6.1	Predikat SAKIP minimal BB	predikat	BB	BB

	satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	6.2	Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L satker minimal 91	nilai	91	92
--	--	-----	---	-------	----	----

4.1.2 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2022 – 2024

Pada periode 2022–2024, terdapat sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan serta target kinerja sebagai berikut.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target PK		
				2022	2023	2024
1	[SK 1] Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra	[IKK 1.1] Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra	produk	2	2	2
2	[SK 2] Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Gerakan literasi kebahasaan dan kesastraan	[IKK 2.1] Jumlah penutur bahasa yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan	orang	806	831	857
3	[SK 3] Terbinanya	[IKK 3.1] Jumlah lembaga terbina	lembaga	45	45	45

	lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan	penggunaan bahasanya				
		[IKK 3.2] Jumlah komunitas penggerak literasi yang terbina	komunitas	31	31	31
4	[SK 4] Meningkatnya jumlah pemelajar BIPA	[IKK 4.1] Jumlah pemelajar bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA)	pemelajar	25	25	25
5	[SK 5] Tersedianya produk diplomasi bahasa	[IKK 5.1] Jumlah produk penerjemahan	produk	10	58	58
6	[SK 6] Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan bahasa dan sastra daerah	[IKK 6.1] Jumlah partisipan perlindungan bahasa dan sastra daerah	orang	273	274	274
7	[SK 7] Meningkatnya tata kelola Kantor Bahasa	[IKK 7.1] Predikat SAKIP Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat	predikat	BB	BB	BB

	Nusa Tenggara Barat					
--	---------------------	--	--	--	--	--

4.2 Kerangka Pendanaan

Upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran-sasaran kegiatan yang telah ditetapkan, Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat memerlukan dukungan berbagai macam sumber daya, dukungan prasarana yang memadai, dukungan regulasi, dan tentunya sumber pendanaan yang cukup. Sehubungan dengan dukungan pendanaan, indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran kegiatan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dibagi ke dalam 2 (dua) periode yakni: Pagu 2020, Pagu 2021, dan Indikasi Kebutuhan Anggaran 2022-2024.

A. Periode T.A. 2020 – 2021

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Pagu (ribu)	
				2020	2021
1	Meningkatnya Daya Ungkap Bahasa Indonesia	1.1	Jumlah Kosakata Bahasa Indonesia	80.365	430.861
2	Terwujudnya Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia	2.1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kebahasaan dan Kesastraan melalui Penelitian	348.840	-
3	Terwujudnya Pengutamaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik	3.1	Jumlah lembaga pengguna bahasa Indonesia terbina	297.538	660.417

4	Meningkatnya Jumlah Penutur Bahasa Terbina	4.1	Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional Terbina Kemahiran Berbahasa dan Bersastra	822.593	522.500
5	Terlindunginya bahasa dan sastra daerah yang kritis danterancam punah	5.1	Jumlah penutur muda yang terlibat dalam perlindungan sastra daerah kritis dan terancam punah	36.921	141.666
		5.2	Jumlah penutur muda yang terlibat dalam perlindungan bahasa daerah kritis dan terancam punah	41.397	-
		5.3	Jumlah produk kesastraan terkembangkan	31.180	401.771
6	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan danPembinaan Bahasa	6.1	Predikat SAKIP Satkerminimal BB	4.841.391	5.056.728
		6.2	Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L satker minimal 91		

B. Periode T.A. 2022 – 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Pagu (Ribuan)		
				2022	2023	2024
1	Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra	1.1	Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra	130.365	134.276	138.304
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Gerakan literasi kebahasaan dan kesastraan	2.1	Jumlah penutur bahasa yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan	703.481	747.048	793.313
3	Terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan	3.1	Jumlah lembaga terbina penggunaan bahasanya	249.254	256.732	264.434
		3.2	Jumlah komunitas penggerak literasi yang terbina	250.000	257.500	265.225
4	Meningkatnya jumlah	4.1	Jumlah pemelajar	100.483	103.497	106.602

	pemelajar BIPA		bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA)			
5	Tersedianya produk diplomasi bahasa	5.1	Jumlah produk penerjemahan	250.000	1.493.50 0	1.538.30 5
6	Meningkatny a partisipasi masyarakat dalam pelindungan bahasa dan sastra daerah	6.1	Jumlah partisipan pelindungan bahasa dan sastra daerah	1.014.32 8	1.048.84 5	1.084.65 1
7	Meningkatny a tata kelola Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat	7.1	Predikat SAKIP Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat	5,030,38 1	5,810,08 2	4,583,72 9



Si
Kika

Kijang Mandalika

Bab V

Penutup

CANTIK

Cepat, Akuntabel, Netral,
Transparan, Inovatif, dan Kredibel



BAB V

PENUTUP

Renstra Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan rancangan induk serangkaian tindakan terkait dengan program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan pada tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Renstra tersebut disusun untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran dan pihak terkait di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Sebagai UPT Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Renstra Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Renstra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 2020–2024 yang memuat tujuan strategis, sasaran strategis, program, indikator program, kegiatan, dan fokus prioritas Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Renstra Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat ini juga memberikan arah kebijakan dan program kerja serta strategi implementasi untuk dapat mencapai target yang telah ditetapkan berdasarkan pada visi dan misi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dalam kurun waktu 2020–2024.

Renstra ini dijadikan acuan kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam melaksanakan program atau kegiatan sesuai tugas dan fungsinya sebagai UPT Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Dalam penanganan masalah kebahasaan dan kesastraan, Renstra Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat ini juga merupakan penjabaran Renstra Unit Eselon II di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, yakni Sekretariat Badan, Pusat Pengembangan dan Pelindungan, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, serta Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa. Renstra Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat ini dapat digunakan dan dijadikan pedoman oleh pemangku kepentingan yang berperan serta dalam penanganan kebahasaan dan kesastraan, khususnya di Provinsi Nusa

Tenggara Barat. Dengan demikian, terbuka kesempatan bagi banyak pihak untuk memberikan kontribusinya dalam pelaksanaan program atau kegiatan kebahasaan dan kesastraan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.



Si
Kika

Kijang Mandalika

Lampiran

1. *Cascading*
2. Matrik Semula menjadi
3. Definisi Operasonal

CANTIK
Cepat, Akuntabel, Netral,
Transparan, Inovatif, dan Kredibel



Penjabaran (Cascading) Sasaran dan Indikator Rencana Strategis
Kantor Bahasa Provinsi NTB
Tahun 2020--2024

SS	IKSS	SP	IKP	SK	IKK	RO	PENGAMPU
Meningkatnya Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan	3.1 Indeks Kemahiran Berbahasa Indonesia	Meningkatnya literasi kebahasaan dan kesastraan	3.1.1 Persentase penutur bahasa Indonesia terbina yang meningkat kualitas berbahasanya	Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra	3.1.1.1 Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra	2021.DDA.001 Produk kodifikasi bahasa 2021.DDA.002 Produk pengembangan sastra	Pusbanglin dan UPT Pusbanglin
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam gerakan literasi kebahasaan dan kesastraan	3.1.1.2 Jumlah bahan pengayaan pendukung literasi kebahasaan dan kesastraan melalui partisipasi masyarakat	2022.DDA.003 Produk pengayaan pendukung literasi	Pusbin
					3.1.1.3 Jumlah penutur bahasa yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan	2022.QDC.001 Penutur bahasa terbina 2022.QDC.002 Penutur bahasa teruji 2022.QDC.003 Generasi muda terbina program literasi	Pusbin dan UPT Pusbin dan UPT Pusbin dan UPT
		Meningkatnya peran bahasa Indonesia di kancah internasional	3.1.2 Persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya	Terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan	3.1.2.1 Jumlah lembaga yang terbina penggunaan bahasanya	2022.BDB.001 Lembaga terfasilitasi layanan profesional kebahasaan	Pusbin dan UPT
					3.1.2.2 Jumlah komunitas penggerak literasi yang terbina	2022.BDB.002 Komunitas penggerak literasi terbina	Pusbin dan UPT
			3.1.3 Jumlah negara yang mengajarkan bahasa Indonesia	Meningkatnya jumlah pemelajar BIPA	3.1.3.1 Jumlah pemelajar bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA)	6702.QDB.001 Lembaga Terfasilitasi Program BIPA	Pustanda dan UPT
				Tersedianya produk diplomasi bahasa	3.1.3.2 Jumlah produk penerjemahan	6702.DDA.002 Produk Penerjemahan	Pustanda dan UPT
	3.2 Indeks Pembangunan Kebudayaan	Meningkatnya kelestarian bahasa daerah	3.2.8 Indeks pemanfaatan bahasa daerah oleh penuturnya	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelindungan bahasa dan sastra	3.2.8.1 Jumlah model pelindungan bahasa dan sastra daerah	2021.DDC.001 Model pelindungan bahasa dan sastra	Pusbanglin
					3.2.8.2 Jumlah partisipan pelindungan bahasa dan sastra daerah	2021.QDC.001 Partisipan pelindungan bahasa dan sastra	UPT
Meningkatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	5.3 Predikat SAKIP Kemendikbudristek	Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi	5.3.11 Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	5.3.11.1 Persentase satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang memiliki predikat SAKIP minimal BB	2020.EBA.962 Layanan Umum	Setban, Pusbang, Pusbin, Pustanda, UPT
	5.4 Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek	5.4.10 Jumlah satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	5.4.10.1 Jumlah satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	2020.EBA.994 Layanan Perkantoran	Setban, Pusbang, Pusbin, Pustanda, UPT
						2020.EBB.951 Layanan Sarana Internal	Setban, Pusbang, Pusbin, Pustanda, UPT*
						2020.EBB.971 Layanan Prasarana Internal	Setban, Pusbang, Pusbin, Pustanda, UPT*

MATRIK SEMULA--MENJADI SASARAN DAN INDIKATOR KANTOR BAHASA PROVINSI NTB

Semula			Menjadi		
No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1.	Meningkatnya Daya Ungkap Bahasa Indonesia	Jumlah Kosakata Bahasa Indonesia	1.	Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra	Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra
2.	Terwujudnya standar kemahiran berbahasa Indonesia	Jumlah rekomendasi kebijakan kebahasaan dan kesastraan			
3.	Terwujudnya Pengutamaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik	Jumlah lembaga pengguna bahasa Indonesia terbina	2.	Terbinanya lembaga Lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan	Jumlah lembaga yang terbina penggunaan bahasanya Jumlah komunitas penggerak literasi yang terbina
4.	Meningkatnya Jumlah Penutur Bahasa Terbina	Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional Terbina Kemahiran Berbahasa dan Bersastra	3.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam gerakan literasi kebahasaan	Jumlah penutur bahasa yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan
			4.	Meningkatnya Jumlah pemelajar BIPA	Jumlah pemelajar bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA)
5.	Terlindunginya bahasa dan Sastra daerah yang kritis dan terancam	Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Sastra Daerah Kritis dan Terancam Puhah	5.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelindungan bahasa dan sastra daerah	Jumlah partisipan pelindungan bahasa dan sastra daerah
		Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Bahasa Daerah Kritis dan Terancam Puhah			
		Jumlah Produk Kesastraan Berkembangkan	6.	Tersedianya produk diplomasi bahasa	Jumlah produk penerjemahan
6.	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Predikat SAKIP Satker minimal BB	7.	Meningkatnya tata kelola Balai Bahasa Papua	Predikat SAKIP Kantor Bahasa Provinsi NTB
		Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 91			Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Kantor Bahasa Provinsi NTB

Lampiran : Definisi Operasional Tahun 2022—2024

Kantor Bahasa Provinsi NTB

DEFINISI OPERASIONAL RENCANA STRATEGIS

SK : [SK1] Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra
IKK : [IKK 1.1] Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra

Definisi

norma kebahasaan yang disusun oleh Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra dan/atau bersama UPT untuk menjadi acuan kebahasaan dan pedoman dalam penyusunan tata bahasa, tata aksara (ejaan), kamus, ensiklopedia, tesaurus, glosarium, korpus, dan acuan kebahasaan lain. Manfaat produk pengembangan bahasa adalah sebagai standar dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar.

Sementara, produk pengembangan sastra adalah produk yang dihasilkan melalui penyusunan bahan pengembangan sastra dan acuan kesastraan lain sehingga dapat digunakan secara lebih meluas dan dapat diakses secara lebih cepat oleh masyarakat. Bentuk-bentuk produk pengembangan sastra berupa, antara lain, buku prosiding, buku bunga rampai, jurnal ilmiah, buku ilmiah, buku acuan, buku pedoman, buku pengayaan pembelajaran sastra, produk alih wahana, dan produk digitalisasi sastra (vlog, video, pangkalan data sastra).

Manfaat dari produk-produk pengembangan sastra, antara lain, memberi rekomendasi kepada pemangku kepentingan, menyampaikan informasi kesastraan kepada masyarakat, menyediakan bahan pengayaan pembelajaran sastra di sekolah dan di perguruan tinggi, serta pengembangan ilmu pengetahuan humaniora.

Metode

Penghitungan

pengembangan bahasa dan sastra yang dihasilkan oleh Badan Bahasa pada tahun tertentu
Satuan: Produk
Tipe Penghitungan: kumulatif

Sumber Data

Periode
Pengumpulan Data:
Tahunan

Pengampu

Kamus dan Istilah Kantor Bahasa Provinsi NTB



Kantor Bahasa
Provinsi Nusa Tenggara Barat

CANTIK

Cepat, Akuntabel, Netral, Transparan, Inovatif, dan Kredibel



SK : [SK 2] Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam gerakan literasi kebahasaan dan kesastraan

IKK : [IKK 2.1] Jumlah penutur bahasa yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan

Definisi

Jumlah penutur bahasa Indonesia yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan dalam kegiatan, antara lain, peningkatan kemahiran berbahasa, peningkatan apresiasi sastra, pengujian kemahiran berbahasa Indonesia, dan pembinaan literasi generasi muda. Penutur Bahasa Indonesia adalah penutur bahasa yang karena profesi dan jabatannya menggunakan bahasa Indonesia, baik lisan maupun tulis. Bentuk pembinaan dilakukan dengan, antara lain, (1) memberikan materi kebahasaan dan kesastraan, (2) memberikan bimbingan teknis praktik baik literasi baca tulis bagi generasi muda, serta (3) melaksanakan pengujian dan pelatihan kemahiran berbahasa Indonesia. Manfaat pembinaan ialah meningkatnya kualitas berbahasa Indonesia para penutur bahasa Indonesia yang terbina.

Metode Penghitungan

Hasil penjumlahan seluruh peserta kegiatan pembinaan penutur bahasa Indonesia. Penghitungan dilakukan dengan rumus berikut
$$JPT = \sum P$$

Keterangan: JPT = Jumlah Penutur terbina
P = Peserta kegiatan
Satuan: Orang
Tipe Penghitungan: Nonkumulatif

Sumber Data

Laporan Internal
Periode Pengumpulan Data: Tahunan



Pengampu

Anggota KKLP Literasi, KKLP Pembinaan, KKLP Penerjemahan, KKLP UKBI Kantor Bahasa Provinsi NTB



SK : [SK 3] Terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan Indonesia

IKK : [IKK 3.1] Jumlah lembaga yang terbina penggunaan bahasanya

Definisi

Jumlah lembaga yang terfasilitasi layanan pembinaan bahasa melalui pendampingan untuk meningkatkan kualitas penggunaan bahasa di lembaga tersebut.

Lembaga adalah unit sasaran pembinaan penggunaan bahasa negara. Tiga kategori untuk lembaga yang dijadikan sasaran ialah lembaga pendidikan, lembaga satuan kerja pemerintah, dan lembaga usaha berbadan hukum Indonesia (swasta).

Bentuk pembinaan yang dilakukan meliputi audiensi, sosialisasi berupa pemberian materi, pendampingan atau asistensi perbaikan penggunaan bahasa pada lembaga, serta pemantauan/evaluasi dan pemberian penghargaan.

Metode Penghitungan

Hasil penjumlahan lembaga yang terfasilitasi layanan pembinaan bahasa yang dilaksanakan oleh Badan Bahasa. Penghitungan dilakukan dengan rumus berikut.
$$JLT = \sum L$$

Keterangan:
JLT = Jumlah lembaga terbina
L = Lembaga yang dibina

Satuan: Lembaga
Tipe Penghitungan: Kumulatif

Sumber Data

Laporan Internal Periode Pengumpulan Data: Tahunan

Pengampu

Anggota KKLP Pembinaan Kantor Bahasa Provinsi NTB



SK : [SK 3] Terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan

IKK : [IKK 3.2] Jumlah komunitas penggerak literasi yang terbina

Definisi

Jumlah komunitas penggerak literasi di Indonesia yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan yang diselenggarakan oleh Badan Bahasa. Komunitas penggerak literasi adalah perkumpulan sosial (di luar pendidikan formal) yang terdiri atas beberapa orang yang memiliki kesamaan tujuan dalam hal menulis dan membaca beserta kegiatan yang menyertainya (pendampingan, praktik baik, dan bimbingan teknis). Komunitas tersebut dikenal di lingkungannya, memiliki nama diri komunitas, memiliki tempat beraktivitas, memiliki struktur kepengurusan, dan memiliki program kerja. Adapun tujuan adanya komunitas penggerak literasi adalah untuk meningkatkan minat baca dan mewujudkan masyarakat yang literat. Bentuk pembinaan yang dilakukan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa ialah dengan, antara lain, (1) penyelenggaraan dan praktik aktivitas literasi baca tulis untuk tingkat dini dan mendasar; (2) penyelenggaraan dan praktik aktivitas literasi baca tulis untuk tingkat menengah atau tingkat atas; (3) penyelenggaraan dan praktik baik literasi di komunitas penggerak literasi; (4) pemanfaatan enam literasi dasar untuk kecakapan hidup (literasi baca tulis, numerasi, sains, digital, finansial, serta budaya dan kewargaan); (5) pemanfaatan bahasa Indonesia dalam industri kreatif; (6) pelatihan bagi pengelola komunitas literasi; serta (7) pemberian fasilitasi lain dalam mendukung pelaksanaan literasi kebahasaan dan kesastraan. Manfaat yang diharapkan dari pembinaan tersebut adalah meningkatnya kompetensi khusus anggota penggerak literasi dalam bidang kompetensi literasi.

Metode Penghitungan

Hasil penjumlahan komunitas penggerak literasi yang terfasilitasi layanan pembinaan bahasa melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
Satuan: lembaga
Tipe Penghitungan: Kumulatif

Sumber Data

Laporan Internal
Periode
Pengumpulan Data:
Tahunan

Pengampu

Anggota KKLP
Literasi Kantor
Bahasa Provinsi
NTB



SK : [SK 4] Meningkatnya jumlah pemelajar BIPA
IKK : [IKK 4.1] Jumlah pemelajar bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA)

Definisi

Jumlah pemelajar BIPA yang belajar bahasa Indonesia secara formal, nonformal, dan informal di dalam dan luar negeri.
 Pemelajar BIPA adalah penutur asing yang mempelajari bahasa Indonesia di dalam dan luar negeri.

Metode Penghitungan

Jumlah akumulasi pemelajar BIPA yang terlayani, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh fasilitasi program BIPA Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (pusat dan/atau UPT balai/kantor bahasa) melalui lembaga.
 Satuan: orang
 Tipe penghitungan: Kumulatif

Sumber Data

Laporan Internal Periode Pengumpulan Data: Tahunan

Pengampu

Anggota KKLP BIPA Kantor Bahasa Provinsi NTB



SK : [SK 5] Tersedianya produk diplomasi bahasa Indonesia

IKK : [IKK 5.1] Jumlah produk penerjemahan

Definisi

Produk penerjemahan adalah buku dan/atau dokumen yang dihasilkan dari pengalihbahasaan dari bahasa sumber ke bahasa sasaran (dari bahasa Indonesia ke bahasa asing dan/atau sebaliknya, serta dari bahasa Indonesia ke bahasa daerah dan/atau sebaliknya). Produk penerjemahan merupakan bentuk produk diplomasi kebahasaan yang berfungsi mendukung kepentingan strategis negara dan pemerintah sekurang-kurangnya untuk (1) mendukung penginternasionalan bahasa Indonesia melalui pemajanan bahasa Indonesia di dunia internasional, (2) memberikan pemahaman tentang nilai keindonesiaan kepada masyarakat internasional, (3) mempercepat penyerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta peradaban dunia, (4) melestarikan kearifan lokal dan mengembangkannya di tingkat nasional, serta (5) meningkatkan pemerataan akses informasi dan komunikasi untuk mewujudkan pembangunan nasional yang inklusif. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, produk penerjemahan dihasilkan dari kegiatan (1) penerjemahan buku ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta karya sastra dari bahasa Indonesia ke bahasa asing atau sebaliknya, (2) penerjemahan dokumen negara dari bahasa Indonesia ke bahasa asing atau sebaliknya, (3) penerjemahan buku dan dokumen dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia atau sebaliknya, (4) penerjemahan dan pengalihaksaraan manuskrip atau prasasti dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia.

Metode Penghitungan

Hasil penjumlahan produk penerjemahan yang dihasilkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Satuan: Produk
Tipe Penghitungan: Kumulatif

Sumber Data

Laporan Internal Periode Pengumpulan Data: Tahunan

Pengampu

Anggota KKLP Penerjemahan Kantor Bahasa Provinsi NTB



SK : [SK 6] Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelindungan bahasa dan sastra daerah

IKK : [IKK 6.1] Jumlah partisipan pelindungan bahasa dan sastra daerah

Definisi

Partisipan pelindungan bahasa dan sastra adalah anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pelindungan bahasa dan sastra. Menurut PP Nomor 57 Tahun 2014, pelindungan bahasa dan sastra adalah upaya menjaga dan memelihara kelestarian sastra, melalui penelitian, pengembangan, pembinaan, dan pengajarannya. Kegiatan pelindungan yang dimaksud mencakup konservasi dan revitalisasi bahasa dan sastra daerah yang dilaksanakan oleh UPT Badan Bahasa. Konservasi bahasa merupakan kegiatan pelindungan yang keluarannya adalah dokumentasi bahasa, baik dalam bentuk dokumen maupun hasil rekaman audio-visual. Dokumen yang dihasilkan dari kegiatan konservasi adalah dokumen sistem tata bahasa (fonologi, morfologi, sintaksis, dan ortografi) yang menjadi dasar penyusunan bahan ajar untuk kegiatan revitalisasi. Sementara revitalisasi bahasa merupakan upaya peningkatan daya hidup bahasa daerah melalui proses pewarisan dan pembelajaran kepada penutur muda.

Konservasi sastra merupakan kegiatan pelindungan yang keluarannya adalah dokumentasi sastra, baik dalam bentuk dokumen maupun hasil rekaman audio-visual. Dokumen yang dihasilkan dari kegiatan konservasi adalah deskripsi lengkap mengenai sastra lisan mulai dari teks, konteks, dan koteks, deskripsi dan transliterasi manuskrip, dan deskripsi sastra cetak berbahasa daerah. Bersama dengan rekaman audio-visual, dokumen yang dihasilkan dari kegiatan konservasi merupakan bahan ajar yang akan dipergunakan dalam kegiatan revitalisasi.

Sementara revitalisasi sastra merupakan upaya peningkatan daya hidup sastra lisan daerah melalui proses pewarisan dan pembelajaran kepada penutur muda. Indikator partisipan pelindungan bahasa sastra diturunkan dari PP Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan,

Metode Penghitungan

Hasil penjumlahan anggota masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pelindungan bahasa dan sastra, yaitu konservasi dan revitalisasi sastra yang dilaksanakan oleh UPT Badan Bahasa.

$$A = B + C$$

Keterangan:

A = Jumlah partisipan pelindungan bahasa dan sastra

B = Jumlah partisipan pelindungan bahasa

C = Jumlah partisipan pelindungan sastra

$$B=M+N$$

Keterangan:

B = Jumlah partisipan pelindungan bahasa

M = Jumlah penutur bahasa yang terlibat sebagai

Sumber Data

Laporan Internal Periode Pengumpulan Data: Tahunan

Pengampu

Anggota KKLP Pelindungan Bahasa dan Sastra Kantor Bahasa Provinsi NTB



Kantor Bahasa
Provinsi Nusa Tenggara Barat

CANTIK

Cepat, Akuntabel, Netral, Transparan, Inovatif, dan Kredibel



Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia, yaitu anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam pendidikan, pendataan, revitalisasi, dan dokumentasi.

Partisipan pelindungan bahasa yang terlibat dalam konservasi bahasa merupakan penutur bahasa yang menjadi narasumber/informan dalam kegiatan konservasi bahasa, baik berupa penyusunan sistem fonologi, morfologi, sintaksis, dan ortografi maupun dalam perekaman audio-visual.

Partisipan pelindungan bahasa yang terlibat dalam revitalisasi bahasa merupakan penutur bahasa yang menjadi pengajar/pembelajar dalam revitalisasi Bahasa. Partisipan pelindungan sastra yang terlibat dalam pelindungan sastra adalah anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pelindungan sastra, yaitu konservasi dan revitalisasi sastra yang dilaksanakan oleh UPT Badan Bahasa, baik sebagai penutur, seniman tradisi, maupun masyarakat pemilik sastra.

informan/narasumber dalam kegiatan konservasi

N = Jumlah

pengajar/pembelajar

dalam kegiatan

revitalisasi bahasa

$C = X + Y$

Keterangan:

C = Jumlah partisipan pelindungan sastra

X = Jumlah pelaku atau pemilik sastra yang

terlibat sebagai

informan/narasumber dalam kegiatan konservasi

Y = Jumlah

pengajar/pembelajar dalam kegiatan

revitalisasi sastra

Satuan: Orang

Tipe Penghitungan:

Kumulatif



Kantor Bahasa
Provinsi Nusa Tenggara Barat

CANTIK

Cepat, Akuntabel, Netral, Transparan, inovatif, dan Kredibel



SK : [SK 7] Meningkatkan tata kelola Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat

IKK : [IKK 7.1] Predikat SAKIP Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat

Definisi

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu dari delapan program yang wajib dijalankan dalam Reformasi Birokrasi Internal (RBI). Penerapan akuntabilitas kinerja pada seluruh instansi pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja diterapkan secara berjenjang mulai dari tingkat Kementerian, unit kerja, dan satuan kerja (unit kerja mandiri). Penerapan akuntabilitas dilakukan mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

Evaluasi atas penerapan SAKIP pada seluruh instansi pemerintah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB). Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government).

Metode Penghitungan

Pelaksanaan Evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Nilai SAKIP= [Perencanaan Kinerja] + [Pengukuran Kinerja] + [Pelaporan Kinerja] + [Evaluasi Kinerja]

Satuan: Predikat
Tipe Penghitungan: Nonkumulatif

Sumber Data

Hasil Evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Biro Perencanaan, Setjen Kemendikbudristek
Periode Pengumpulan Data: Tahunan

Pengampu

Koordinator Tata Usaha



SK : [SK 7] Meningkatkan tata kelola Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat

IKK : [IKK 7.2] Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat

Definisi

Kinerja Anggaran dalam PMK No. 214 / PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L dievaluasi dalam rangka pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran dilakukan atas 3 aspek yaitu aspek konteks, aspek implementasi dan aspek manfaat.

Penilaian Kinerja dilakukan atas 2 indikator 1. Indikator Kinerja atas Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 2. Indikator Kinerja atas hasil pelaksanaan anggaran (EKA) IKPA Berkontribusi 40% dalam perhitungan nilai Kinerja dan EKA 60% Bobot masing-masing variabel pada Aspek Implementasi sebagaimana dimaksud terdiri atas: capaian keluaran, efisiensi, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, dan penyerapan anggaran.

Dalam melaksanakan Evaluasi Kinerja Anggaran sebagaimana dimaksud, Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Menteri/Pimpinan Lembaga, pimpinan unit eselon I, dan/atau pimpinan satuan kerja. Dalam rangka pelaksanaan koordinasi Evaluasi Kinerja Anggaran sebagaimana dimaksud, Menteri/Pimpinan Lembaga, pimpinan unit eselon I, dan pimpinan satuan kerja melaksanakan Evaluasi Kinerja Anggaran yang berada dalam lingkup kewenangannya. Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-KL pada setiap tahunnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan

Metode

Penghitungan

Nilai Kinerja Anggaran:
Nilai IKPA [40%] + Nilai EKA [60%]
Sesuai dengan PMK, Nilai Kinerja Anggaran dikelompokkan ke dalam kategori sebagai berikut:

Nilai Kinerja

>90% Sangat Baik

>80%-90% Baik

>60%-80% Cukup

>50%-60% Kurang

<50 Sangat Kurang

Satuan: Nilai

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

Sumber Data

Aplikasi SMART DJA (EKA)
2. Aplikasi OM SPAN (IKPA)

Pengampu

Koordinator
Tata Usaha





Kantor Bahasa Provinsi NTB

Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru,
Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram

CANTIK
Cepat, Akuntabel, Netral,
Transparan, Inovatif, dan Kredibel

